

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Definisi Strategi

Kata strategi memiliki beberapa macam makna dan arti. Kata strategi berasal dari kata “*strategos*” dalam bahasa Yunani, merupakan gabungan dari kata “*stratos*” yang berarti militer dan “*ag*” yang berarti memimpin.

“Pada mulanya konteks awal strategi dapat diasumsikan sebagai sesuatu yang sering kali dilakukan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk menaklukkan dan mengalahkan musuh untuk mendapatkan kemenangan dalam peperangan. Oleh karena itu, istilah strategi sangat lekat dengan dunia militer dan politik” (Nugraha, 2014:2).

Pada awalnya strategi merupakan hal yang lumrah dalam dunia militer menghadapi peperangan untuk mengalahkan musuh. Berbeda dengan organisasi bisnis atau organisasi publik, organisasi pemerintahan tidak memiliki keleluasaan secara tajam untuk membedakan posisi antar pemangku kepentingan (*stake holder*). Hingga dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun *stake holder* yang memiliki posisi yang dominan dalam organisasi pemerintahan. Karena pada dasarnya organisasi pemerintahan memiliki ketergantungan yang tinggi akan tetapi relatif merata pada hampir semua *stake holder* yang ada.

Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam sebuah organisasi, strategi menentukan arah langkah suatu pengembangan organisasi tersebut dalam menentukan strategi yang kompetitif. Adapun strategi dibuat untuk menentukan langkah yang tepat dalam penyelesaian masalah yang

sedang dihadapi. Strategi yang dibuat tentunya harus diimplementasikan dalam penyelesaian masalah sehingga tolak ukur strategi akan dapat diukur dari implementasinya.

Strategi merupakan landasan awal bagi sebuah organisasi dan elemen-elemen di dalamnya untuk menyusun langkah-langkah atau tindakan-tindakan dengan memperhitungkan faktor-faktor internal dan eksternal dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Selain itu, suatu organisasi harus mampu berinteraksi dengan lingkungan dimana strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga strategi tersebut tidak bertentangan dengan keadaan lingkungan yang ada. Strategi merupakan perluasan misi guna menjembatani organisasi dengan lingkungannya. Strategi harus mampu berkembang untuk mengatasi isu-isu strategis yang ada di lingkungannya, di mana strategi harus mampu meresponi organisasi terhadap pilihan kebijakan yang akan diambil. Itu sebabnya suatu strategi mempunyai skema untuk mencapai sasaran apa yang akan dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan (Supriatna, 2018:34-35). Sebagaimana yang dikutip oleh Supriatna dari Marrus, Marrus mendefinisikan bahwa strategi sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan upaya agar tujuan tersebut dapat dicapai. Maka dari itu, definisi yang disebutkan oleh Marrus dapat dikatakan strategi sebagai cara untuk menentukan sebuah rencana yang dilakukan oleh pemimpin puncak tertinggi. Perancangan strategi tersebut dibuat dengan agar perusahaan atau instansi tersebut dapat mencapai apa yang

menjadi tujuannya. (Marrus, 2002:31)

Strategi yang diutarakan oleh Kaplan dan Norton adalah

”Strategi mendeskripsikan bagaimana perusahaan bertujuan untuk menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan, pelanggan dan masyarakat. Strategi bukanlah proses manajemen yang berdiri sendiri, ini adalah salah satu langkah dalam sebuah kontinum yang logis yang menggerakkan organisasi dari pernyataan misi tingkat tinggi untuk pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan baris depan dan belakang kantor. Strategi dikembangkan dan berevolusi dari waktu ke waktu untuk memenuhi perubahan kondisi yang ditimbulkan oleh lingkungan eksternal dan kemampuan internal.

Adapun beberapa indikator strategi menurut Kaplan dan Norton, di antaranya adalah:

- a. Strategi menyeimbangkan kekuatan yang bertentangan (*Strength*)
- b. Strategi didasarkan pada proposisi nilai pelanggan yang berbeda (*Values*)
- c. Nilai diciptakan melalui proses bisnis internal (*Progress*)
- d. Strategi terdiri dari tema yang melengkapi secara bersamaan (*Theme*)
- e. Keselarasan strategis menentukan nilai aset tak berwujud (*Harmony*) (Kaplan & Norton, 2004:4-32)

Strategi yang diutarakan oleh Kaplan dan Norton di atas, berbicara tentang bagaimana suatu perusahaan membuat *added values* untuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan pada suatu perusahaan. Karena pada dasarnya strategi tidak dapat berdiri sendiri, strategi dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengarahkan para karyawan untuk dapat merubah suatu kondisi suatu perusahaan yang sesuai dengan kemampuan di internal perusahaan tersebut.

Menurut Kaplan dan Norton, strategi mendeskripsikan bagaimana perusahaan bertujuan untuk menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan, pelanggan dan masyarakat. Strategi bukanlah proses manajemen yang berdiri sendiri, ini adalah salah satu langkah dalam sebuah kontinum yang logis yang menggerakkan organisasi dari pernyataan misi tingkat tinggi untuk pekerjaan yang

dilakukan oleh karyawan baris depan dan belakang kantor. Strategi dikembangkan dan berevolusi dari waktu ke waktu untuk memenuhi perubahan kondisi yang ditimbulkan oleh lingkungan eksternal dan kemampuan internal (Kaplan & Norton, 2004:4-32).

Menurut saya strategi menurut Kaplan dan Norton adalah bagaimana suatu perusahaan harus memiliki strategi tersendiri agar perusahaan atau organisasi itu dapat bertahan dengan baik dalam kondisi apapun.

“Ada juga Geoff Mulgan yang menyatakan, “*Public strategy is the systematic use of public resources and powers, by public agencies, to achieves public goods*”. Strategi yang diutarakan oleh Geoff Mulgan sendiri lebih berbicara mengenai strategi yang diperuntukan untuk organisasi pembuat kebijakan (pemerintah). Di mana strategi berguna sebagai sistem yang dapat mengatur kekuasaan dan sumber daya yang ada lewat organisasi publik (pemerintah) yang bertujuan untuk kepentingan publik (Mulgan, 2009:19)”.

Berdasarkan Pengertian di atas, Geoff Mulgan, menguraikan strategi pemerintahan ke dalam lima (5) indikator, yaitu: *Purposes* (Tujuan), *Environment* (Lingkungan), *Direction* (Pengarahan), *Action* (Tindakan), dan *Learning* (Pembelajaran). Jika peneliti perhatikan dari kelima komponen yang diutarakan oleh Mulgan, semua komponen tersebut memiliki unsur politik yang kuat, yang tidak lain untuk membuat suatu kebijakan maupun menjalankan kepentingan pemerintahan. Strategi yang diutarakan oleh Geoff Mulgan juga merupakan strategi publik yang jelas berbeda dengan strategi perusahaan. Dari teori dan komponen yang diutarakan oleh Mulgan di atas, Mulgan menilai ada dua sumber daya utama yang diperlukan dalam proses desain dan proses implementasinya, di antaranya adalah *power* (kekuasaan) dan *knowledge* (ilmu pengetahuan).

Hal tersebut yang melatar belakangi peneliti untuk menggunakan teori dan komponen yang diutarakan oleh Geoff Mulgan. di mana dari teori dan kelima komponen di atas, memiliki pendekatan baik secara politik dan pemerintahan dalam merancang strategi dan mengimplementasikan strategi yang dibuat untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu, peneliti memiliki beberapa indikator yang dapat mendukung indikator yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan, sebagaimana yang peneliti ungkapkan di bawah ini:

1. *Purpose*
2. *Environment*
3. *Direction*
4. *Action*
5. *Learning*

- a) *Purposes* (Tujuan), Tujuan adalah pernyataan tentang keadaan di mana suatu organisasi atau perusahaan ingin mencapai ini dan pernyataan tentang keadaan organisasi di masa depan sebagai upaya bersama untuk itu. Sedangkan *mission* (misi) adalah suatu langkah ataupun tahapan yang semuanya harus dilalui oleh lembaga yang bersangkutan untuk dapat mencapai visi yang utama. dan *passion/vocation* (bakat/kemampuan) yaitu kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Dari tentang tujuan tersebut dapat kita ketahui bahwa untuk memiliki sebuah tujuan dibutuhkan misi dan kemampuan untuk

menjalankan dan mengimplementasi misi tersebut agar berjalan dengan baik.

- b) *Environment* (Lingkungan), Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita, yang menyatakan bahwa indikator dari sebuah lingkungan dapat diukur dari *changes in ambient conditions* (perubahan yang terjadi pada kondisi sekitar)
- c) *Direction* (Pengarahan), adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Peneliti mengambil teori yang dikemukakan oleh *George R. Terry* (1986), yang merupakan

“usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karenapara anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.”

Pada bagian ini terdapat empat indikator pengarahan atau *directions*, di antaranya adalah, koordinasi (*coordination*), motivasi (*motivation*), komunikasi (*communication*), dan perintah (*command*). Pada *directions* atau pengarahan dapat kita ketahui ada empat indikator yang dapat menjadi acuan dari sebuah pengarahan.

- d) *Action* (Tindakan), sebuah perbuatan yang merupakan respon dari hasil pengamatan yang memunculkan persepsi. Saat seseorang melihat sesuatu atau mendengarkan sesuatu pada bagian ini terdapat tiga indikator, di antaranya adalah: *external situation* (situasi eksternal), *device* (perangkat yang digunakan), dan *decission making* (pengambilan keputusan). Ketiga hal ini sangat berkaitan eratsaat akan melakukan sebuah tindakan.
- e) *Learning* (Pembelajaran), proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. pada bagian ini terdapat dua indikator penting, di antaranya adalah: *comparation method* (metode perbandingan), dan *identification* (identifikasi).

Menurut pendapat para ahli di atas, dapat diartikan bahwa strategi merupakan rencana yang disusun oleh manajemen puncak (*Top Management*) untuk mencapai tujuan yang diinginkan, rencana ini bisa meliputi tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi untuk mempertahankan dan menguatkan eksistensi organisasi dan mampu memenangkan persaingan di luar, namun yang terpenting bagi perusahaan atau organisasi harus memiliki keunggulan kompetitif untuk meningkatkan daya saing. Cara berpikir strategis ini tentunya sangat penting bagi sebuah organisasi, karena strategi merupakan langkah awal untuk memahami dan mengimplementasikan strategi tersebut.

2.1.2 Tahapan Penyusunan Strategi

Tahapan penyusunan strategi pada organisasi pemerintahan terdapat dua macam/model pendekatan, yaitu pendekatan dari atas ke bawah (*top down approach*) dan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up approach*). Untuk model *top down approach*, proses penyusunan strategi organisasi pemerintahan lebih diprioritaskan pada pendapat-pendapat level atas yang kemudian diturunkan pada tingkat selanjutnya. Sebaliknya, untuk *model bottom up approach*, level bawah dan menengah menjadi titik awal dari proses penyusunan strategi organisasi pemerintahan. Adapun beberapa langkah untuk menyusun strategi, adalah:

- a. Identifikasi Masalah
Sebagai tahap awal untuk menyusun strategi dengan berusaha untuk mengidentifikasi masalah-masalah strategis yang muncul dengan cara melihat gejala-gejala yang mengikutinya. Proses identifikasi masalah tersebut dapat dilakukan menggunakan metode *brainstroming* atau *polling* pendapat sebagai upaya untuk mengidentifikasi masalah yang ada.
- b. Pengelompokan Masalah
Dari tahapan identifikasi masalah di atas akan muncul masalah baru yang beraneka ragam. Maka dari itu untuk mempermudah cara pemecahannya, perlu dilakukannya pengelompokan/pengklasifikasian masalah yang sesuai dengan sifat atau karakter tujuan pengelompokan masalah tersebut.
- c. Proses Abstraksi
Setelah kelompok masalah terbentuk, tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi masalah-masalah krusial dari tiap kelompok. Selanjutnya, dapat dilakukan analisis terhadap masalah tersebut guna mencari faktor penyebab timbulnya masalah. Tahap ini memerlukan ketelitian dan kesabaran karena faktor-faktor ini akan disusun bersamaan dengan metode pemecahan masalahnya.

d. Penentuan Cara Pemecahan Masalah

Setelah tahap abstraksi selesai dilakukan, hal berikutnya yang dilakukan adalah menyelesaikan/memecahkan masalah yang telah teridentifikasi pada tahap pertama. Metode atau cara penyelesaian masalah ini harus konkret dan spesifik.

e. Perencanaan Untuk Implementasi

Tahapan untuk menyusun strategi di atas merupakan langkah penting yang harus dilakukan dalam rangka memecahkan atau menyelesaikan suatu permasalahan.

“Namun hal terpenting dari semua penyusunan tersebut adalah mengimplementasikan seluruh penyusunan strategi yang sudah dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada” (Nugraha, 2014:21).

Nugraha menyatakan bahwa untuk menyusun suatu strategi diperlukan setidaknya lima tahapan yang harus dilakukan, yaitu identifikasi masalah, pengelompokan masalah, proses abstraksi, penentuan cara pemecahan masalah, dan perencanaan untuk implementasi.

2.1.3 Faktor-Faktor Penentu Pemilihan Strategi

Ada beberapa pertanyaan untuk mengetahui variabel atau faktor apa saja yang berpengaruh pada penentuan dalam pemilihan strategi yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ada variabel eksternal dan internal yang mempengaruhi pola penentuan strategi, yaitu: keterbatasan sumber daya dan keuangan, prioritas pemangku kepentingan (*stake holder*), agenda politik, tingkat dukungan publik, ketersediaan anggaran pemerintah, Perimbangan kekuatan konstituen, dan Mandat hukum.

Sementara itu, terdapat juga variabel internal yang memiliki pengaruh pada pemilihan strategi, yaitu: Kepemimpinan organisasi, Kapasitas organisasi, Konsensus internal akan kebijakan yang dipilih, Diskresi oleh pengendali politik, Alternatif ketersediaan sumber dana, Tipe kebijakan, dan Perubahan teknologi pada pemberian pelayanan.

2.1.4 Penerapan Strategi

Menurut David, penerapan strategi merupakan tahap aksi dari manajemen strategis. Menerapkan strategi berarti memobilisasi karyawan dan manajer untuk melaksanakan strategi yang telah dirumuskan. Sering kali dianggap sebagai tahap yang paling sulit dalam manajemen strategis. Penerapan strategi membutuhkan disiplin, komitmen, dan pengorbanan personal. Penerapan strategi yang berhasil bergantung pada kemampuan manajer untuk memotivasi karyawan, yang lebih merupakan seni daripada pengetahuan. Strategi yang telah dirumuskan, namun tidak diterapkan berarti strategi tersebut tidak ada gunanya. Penerapan strategi mengharuskan perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya, sehingga strategi-strategi yang telah dirumuskan dapat dijalankan. penerapan strategi mencakup: pengembangan budaya yang suportif pada strategi, penciptaan struktur

organisasional yang efektif, pengurangan ulang upaya-upaya pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, dan pengaitan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi.

“Dari pandangan David, penerapan strategi harus dilakukan untuk dapat menetapkan tujuan tahunan dan kebijakan-kebijakan perusahaan atau organisasi, sehingga perusahaan atau organisasi tersebut terarah dan dapat menjalankan perusahaan atau organisasi tersebut dengan baik” (David, 2011:7).

2.1.5 Penilaian Strategi

Menurut David, Penilaian strategi merupakan tahap terakhir dalam manajemen strategis. Manajer harus tahu kapan ketika strategi tertentu tidak berjalan dengan baik. Penilaian atau evaluasi strategi merupakan cara utama untuk memperoleh informasi tersebut. Semua strategi terbuka untuk dimodifikasi di masa yang akan datang karena berbagai faktor eksternal dan internal akan terus-menerus berubah. Penilaian strategi diperlukan karena apa yang berhasil saat ini tidak selalu berhasil nanti.

“Ada tiga aktivitas penilaian strategi yang mendasar yaitu: peninjauan ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini, pengukuran kinerja, dan pengambilan langkah korektif. Penilaian suatu strategi dianggap penting oleh David, pada dasarnya dibuat agar dapat diketahui strategi mana yang tidak berjalan maksimal dan mana strategi yang bahkan tidak berjalan sama sekali, yang kemudian dapat dirubah dengan mengikuti perkembangan yang terus menerus mengalami perubahan” (David, 2011:7).

2.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Pasal 1 ayat (4), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD sebagai badan legislatif daerah mempunyai kedudukan yang sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah.

2.2.1 Tugas dan Fungsi DPRD

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Pasal 42 ayat (1) DPRD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a) membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b) membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- c) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;

- d) mengusulkan pengangkatan dan pei-iberhentian kepaladaerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeni bagi DPRD Provinsi dan kepadaMenteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;
- e) memilih wakil kepala daerah Jam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- f) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjianinternasional di daerah; g) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja samainternasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- i) dihapus; Universitas Sumatera Utara
- j) melakukan pengawasan dan meminta laporan KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- k) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama.

2.3 Artikulasi

Artikulasi adalah suatu teknik memproduksi suara yang baik dan mengucapkannya dengan jelas, nyaring, dan merdu. Sedangkan menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikulasi adalah lafal atau pengucapan kata, perubahan rongga dan ruang yang terjadi dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa. memperjuangkan apa yang telah menjadi kebijakan. Partai politik juga dipersepsikan dapat menampung aspirasi rakyat dan kemudian menganalisanya sebelum diusulkan kepada pemerintah.

Artikulasi adalah Perubahan rongga dan ruang yang terjadi dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi atau bahasa. Daerah artikulasi terletak dari bibir luar sampai pita suara, dimana fonem-fonem terbentuk dari getaran pita suara disertai dengan perubahan posisi lidah dan semacamnya. Artikulasi artinya pengucapan kata melalui mulut agar terdengar dengan baik dan benar serta jelas, sehingga telinga pendengar atau penonton bisa mengerti pada kata kata yang diucapkan.

Menurut Mustain (2010: 30) artikulasi adalah apa yang kita definisikan sebagai struktur-struktur dalam otak yang melibatkan kemampuan bicara (area kemampuan bicara), membaca atau pemrosesan kata lainnya dan area gerak tambahan (menulis, membuat sketsa, dan gerak-gerak ekspresif lainnya).

2.4 Aspirasi Masyarakat

Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasibercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut.

Aspirasi dalam bahasa Inggris *'aspiration'* berarti cita-cita. Aspirasi menurut Katadasarnya, *aspire* berarti cita-cita atau juga berkeinginan Echols (1983:41). Sedangkan menurut Poerwadarminta (1976) aspirasi adalah gairah (keinginan atau harapan yang keras). Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, yang disebut cita-cita adalah keinginan, harapan, tujuan yang selalu ada dalam pikiran. Disadari atau tidak semua orang tentu mempunyai rencana hidup. Sehubungan dengan rencana hidup, Hurlock (1974:265) menyatakan Setiap orang mempunyai rencana hidup yang ingin dicapai sebagai hasil hubungan fisik dan sosial dengan lingkungannya. Rencana hidup ini sedikit banyak ikut menentukan kegiatan yang dilakukan sekarang. Menurut Amirudin (2003:3) secara definitif merumuskan, konsep dari aspirasi mengandung dua pengertian, aspirasi di tingkat ide dan aspirasi di tingkat peran struktural. Di tingkat ide, konsep berarti sejumlah gagasan verbal dari apisan masyarakat manapun. Di tingkat peran dalam struktur adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan yang diadakan pemerintah.

Willmore dalam Hardjo (2008 :160) mengidentifikasi 4 tipologi proses bagi pengintegrasian partisipasi warga dalam penyusunan anggaran. Partisipasi tersebut bisa didorong oleh Negara (*top-down*) maupun masyarakat sipil (*bottom-up*) baik melalui parlemen maupun tanpa parlemen (*participation that by-pass parliament*). Warga dan masyarakat sipil belum mempunyai cukup

kapasitas untuk mendorong perluasan partisipasi warga dalam prosedur formal tersebut atau, jika hambatan partisipasi dalam prosedur formal tersebut terlalu kuat, untuk membangun mekanisme tanding bagi suatu proses penyusunan penganggaran yang lebih partisipatif (Hardoyo, 2008 : 161-162) Aspirasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan. Jadi aspirasi masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik berupa keterlibatan langsung maupun berupa sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun sehingga mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan. Prinsip dasar dalam melibatkan masyarakat secara langsung adalah bahwa apa yang disebut dengan melibatkan kepentingan rakyat hanya akan terjadi jika masyarakat itu sendiri yang ambil bagian. Dengan adanya keterlibatan rakyat itu sendiri maka dengan sendirinya pula akan menjadi penjamin bagi suatu proses baik dan Bener (Bank Dunia dalam Salman 2005:3). Abe dalam Salman (2009:22), beranggapan dengan melibatkan masyarakat maka secara langsung akan membawa tiga dampak penting yaitu :

- a. Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. Karena dengan terlibatnya masyarakat maka akan memperjelas apa yang sebetulnya terjadi di masyarakat.
- b. Memberikan nilai tambah dalam hal legitimasi rumusan perencanaan. Karena semakin banyak masyarakat yang terlibat, maka akan semakin baik.
- c. Dan juga dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik di masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dalam proses pembuatan keputusan, sampai pada tahap pengawasan telah diatur dalam undang –undang. Misalnya Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; bahwa pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Dari penjelasan diatas, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peluang untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan, serta adanya peluang yang luas bagi anggota DPRD untuk mendengar, menghimpun dan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk menjadi program-program yang mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan berkembangnya pelaksanaan demokrasi dan dengan adanya otonomi daerah, diharapkan masyarakat dapat

berupaya secara optimal untuk memperbaiki kesejahteraannya melalui berbagai program pembangunan sesuai dengan kepentingan dan potensinya, serta pemerintah bertindak sebagai katalisator. Untuk itu para elit politik khususnya anggota DPRD yang berkewajiban untuk menyerap aspirasi masyarakat harus lebih dekat dengan masyarakat dan tidak lagi memandang masyarakat sebagai objek dari pembangunan, agar dapat membuat program yang bisa memecahkan masalah yang ada bukan memperbanyak masalah yang ada di masyarakat.

Gambar 2.1

Standar Pelayanan Penyampaian Aspirasi masyarakat

NOI KOMPONEN	URAIAN
1. Perwakilan	<ul style="list-style-type: none"> Berkas surat dari masyarakat / lembaga / instansi terkait. Berkas surat keluar dari DPRD untuk diteliti dan dipaparkan / tertuang / menjadi kerjakan.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> Adaptasi surat masuk dan memisahkan dengan surat keluar. Aktivitas yang / membuat surat keluar dilakukan dengan agenda kegiatan pimpinan dan atau kerangka DPRD Kota Tasikmalaya. Surat keluar diparaf kepada Kepala Majelis dan dipaparkan, diteliti dan diteliti, dan di terima dengan oleh ketua DPRD serta diberi respon dan dijawab. Diikuti ke masyarakat / lembaga / instansi terkait. Kejelasan hasil / informasi dengan program dan atau kerangka DPRD, yang akan diteliti dan dijawab. Membuatkan laporan dan atau informasi yang sudah diteliti, diteliti, diteliti, dan dijawab. Menyampaikan hasil dan atau informasi yang sudah diteliti, diteliti, diteliti, dan dijawab. Menyampaikan hasil dan atau informasi yang sudah diteliti, diteliti, diteliti, dan dijawab. Menyampaikan hasil dan atau informasi yang sudah diteliti, diteliti, diteliti, dan dijawab.
3. Terdapat website	<ul style="list-style-type: none"> Ada website / informasi yang sudah diteliti, diteliti, diteliti, dan dijawab.
4. Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> Ada akses / informasi yang sudah diteliti, diteliti, diteliti, dan dijawab.
5. Respon	<ul style="list-style-type: none"> Ada respon / informasi yang sudah diteliti, diteliti, diteliti, dan dijawab.

(Sumber : Kantor DPRD Kota Tasikmalaya, 17 Mei 2022)

Ini adalah standar dari fasilitas penyampaian aspirasi masyarakat yang ada di DPRD Kota Tasikmalaya. Masyarakat yang ingin me nyalurkan aspirasinya dapat melihat prosedurnya terlebih dahulu agar bejalan lancar.

Gambar 2.2

Pengelolaan Pelayanan



(Sumber : Kantor DPRD Kota Tasikmalaya, 17 Mei 2022)

Ini adalah mekanisme pelayanan dari pengelolaan pelayanan di DPRD Kota Tasikmalaya jadi ada beberapa alur yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka jika prosedur dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan sebagaimana alurnya maka aspirasi itu akan dapat tersampaikan ke anggota dewan dengan mengadakan seperti menerima adanya audiensi bahkan demonstrasi

2.5 Kerangka Pemikiran

Dalam mengelola aspirasi masyarakat tersebut, ada berbagai macam masalah yang mungkin belum dapat diselesaikan oleh aparatur terkait seperti masih adanya kurang komunikasi antar bagian yang dimana pengelolaan aspirasi itu ada diranah humas dan protokol akan tetapi kadang aspirasi itu disalurkan melalui Tata usaha atau melalui sekretaris pribadi dewan baru disampai ke anggota dewan, meskipun aspirasi tersebut memang benar tersampaikan tetapi dengan adanya permasalahan yang terjadi di dalam suatu organisasi pemerintah seperti ini yang dimana permasalahan ini dapat terselesaikan dengan efisien, Maka dari itu permasalahan seperti ini di dalam suatu instansi pemerintah harus cepat terselesaikan agar dalam hal pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif dan jelas alurnya.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan seperti alurnya yang masih belum jelas dan sesuai maka pengelolaan aspirasi masyarakat mungkin masih sedikit kurang maksimal. Maka para aparatur DPRD Kota Tasikmalaya harus bisa menangani masalah internal seperti ini agar penyaluran aspirasi oleh masyarakat yang akan dikelola berjalan baik dan lancar. Peneliti menggunakan teori dan komponen yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan untuk meneliti strategi apa yang dibuat oleh DPRD Kota Tasikmalaya dalam mengelola aspirasi masyarakat guna

penguatan kepada aparatur di antaranya adalah:

Tujuan (*Purposes*), Lingkungan (*Environments*), Pengarahan (*Directions*), Tindakan (*Actions*), dan Pembelajaran (*Learnings*). Agar suatu strategi dapat dibuat dan kemudian diimplementasikan oleh pemerintah, strategi yang diutarakan oleh Geoff Mulgan memerlukan Kekuasaan (*Power*) dan Ilmu Pengetahuan (*Knowledge*) untuk menunjang semua komponen yang diutarakan oleh Mulgan. Hal tersebut peneliti jabarkan sebagai berikut:

- a. Tujuan (*purposes*), adalah upaya untuk mencapai hal yang menjadi sasaran yang akan dijangkau oleh organisasi atau perangkat pemerintahan. Di mana pada tujuan ini juga meliputi misi, yang berupa arah yang diinginkan oleh masyarakat dengan memaksimalkan kemampuan yang ada guna penguatan DPRD Kota Tasikmalaya dan anggota dewan dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat.
- b. Lingkungan (*environments*) Lingkungan juga meliputi aspek perubahan pada kondisi sekitar, lingkungan yang juga turut mempengaruhi strategi yang dibuat oleh DPRD Kota Tasikmalaya dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat.
- c. Pengarahan (*directions*), adalah petunjuk atau instruksi atau arahan yang diberikan oleh pemberi arahan (dalam hal ini adalah pimpinan) yang

meliputi koordinasi, komunikasi, dan motivasi yang baik dan benar, untuk melakukan suatu perintah resmi yang berasal dari pimpinan, guna penguatan DPRD Kota Tasikmalaya dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat.

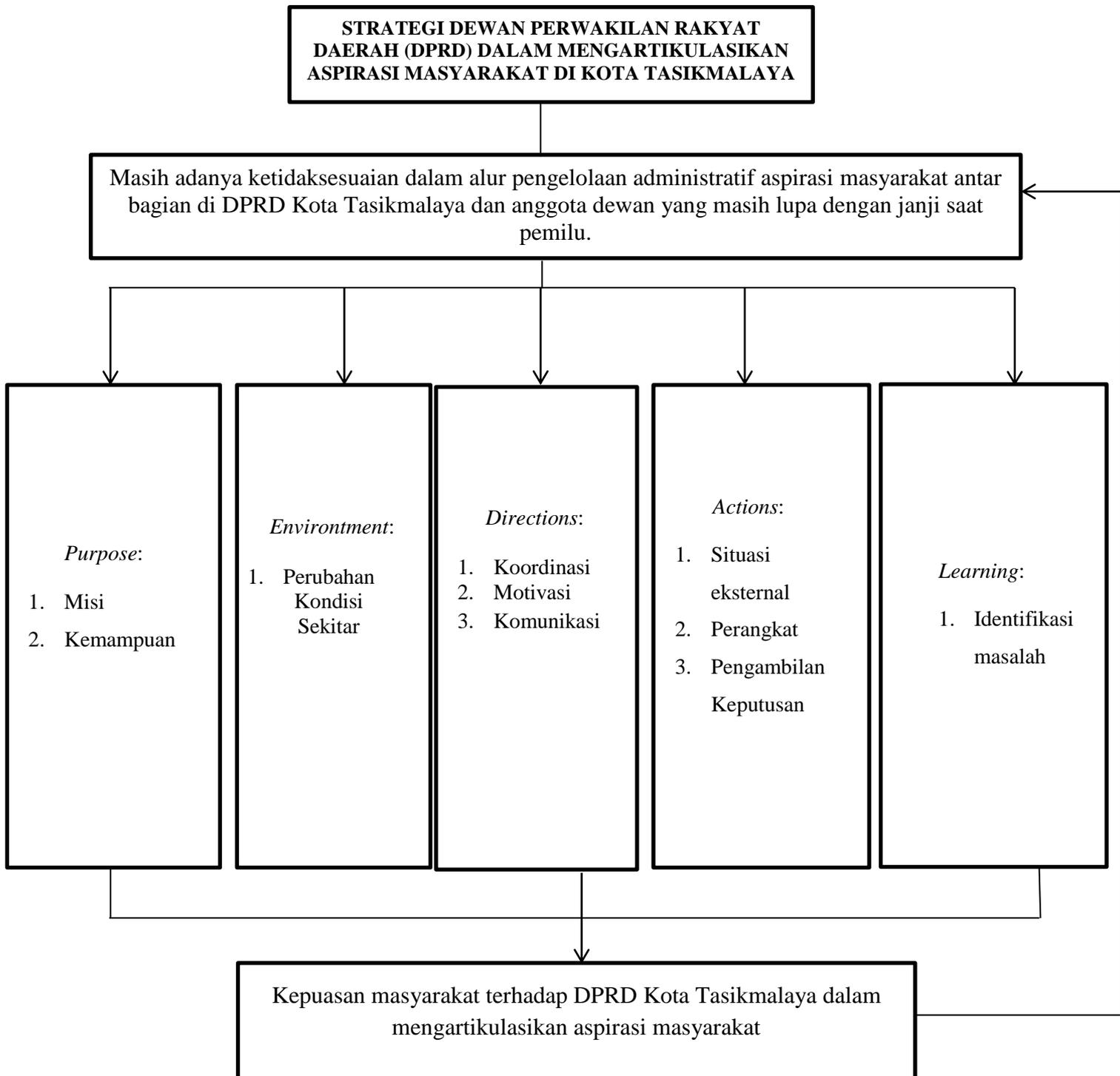
d. Tindakan (*actions*), adalah upaya yang dilakukan guna mendapatkan hal-hal yang menjadi tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi atau perangkat pemerintahan di mana pada tindakan meliputi situasi di eksternal, dan didukung dengan bagian-bagian yang ada dan dimiliki oleh DPRD Kota Tasikmalaya, sehingga nantinya dapat diambil suatu keputusan yang dilakukan DPRD Kota Tasikmalaya guna penguatan dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat.

e. Pembelajaran (*Learnings*), adalah proses yang dilakukan oleh organisasi atau perangkat pemerintahan untuk menentukan strategi maupun merumuskan kebijakan yang di mana di dalamnya meliputi metode perbandingan dan identifikasi. Sehingga DPRD Kota Tasikmalaya dapat mencari apa identifikasi masalah yang ada.

Maka dapat disimpulkan melalui model kerangka pemikiran di bawah ini yang penjelasannya sudah dipaparkan di atas seperti adanya aspek tujuan, lingkungan, pengarahan, tindakan, dan pembelajaran.

2.5.1 Model Kerangka Pemikiran

Gambar 2.3



Model kerangka pemikiran diatas menggambarkan bagaimana strategi itu berjalan seperti masalah itu ada setelah adanya masalah maka indikator strategi yaitu *purpose, environment, directions, action, dan learning* itu dijalankan dengan baik dan sesuai maka akan terciptanya kepuasan dari masyarakat terhadap DPRD Kota Tasikmalaya dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat.

2.6 Proposisi

Berdasarkan uraian di atas maka proposisi penelitian ini adalah keberhasilan Strategi DPRD Kota Tasikmalaya dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat ditentukan dari indikator *purpose, environment, directions, action, dan learning*.